

Analisis Sistem Ekonomi Konvensional Pada Masa Pemerintahan Orde Baru Dan Perbandingannya dengan Masa Reformasi

Dimas Dwi Fernando – 170810180047

Pendahuluan

Setiap negara memiliki pilihan dalam sistem ekonomi politik yang digunakannya dalam mengatur berjalannya pemerintahan negara tersebut. Setiap periode pemerintahan akan digunakan sistem ekonomi politik yang berbeda juga sesuai dengan bagaimana para pejabat pemerintahan yang berkuasa saat itu. Hal ini juga terjadi di Indonesia, bahwa setiap masa pemerintahan akan memiliki ciri khasnya masing-masing mengenai sistem ekonomi politik apa yang digunakan dalam menjalankan perekonomian dan pembangunan negara.

Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai paradigma sistem ekonomi politik apa yang digunakan oleh pemerintahan pada masa Orde Baru dan akan dibandingkan dengan paradigma sistem ekonomi politik apa yang digunakan pada masa Reformasi. Hal ini dikarenakan masa Orde Baru dan Reformasi merupakan masa pemerintahan yang cukup mendapatkan perhatian diantara masa pemerintahan di Indonesia yang lainnya.

Untuk lebih jelasnya, secara singkat dapat disebutkan bahwa paradigma yang akan menjadi dasar analisis untuk mengetahui kebijakan ekonomi politik di Indonesia pada masa Orde Baru adalah paradigma sistem ekonomi konvensional. Dimana dalam paradigma sistem ekonomi politik konvensional ini dapat dijelaskan mengenai teori kapitalisme, sosialisme-komunisme, ekonomi campuran, dan juga ekonomi pembangunan. Pengertian dasar secara singkat dari sistem ekonomi politik konvensional ini memiliki pendekatan yaitu pasar yang diatur diri sendiri dan juga masalah yang berkaitan dengan agenda publik.

Landasan Teori

Paradigma Sistem Ekonomi Politik Konvensional

Pada konsep ekonomi klasik, politik memiliki peran sebagai pelengkap dari ekonomi dan juga sebagai sebuah unsur yang akan bersinggungan secara langsung dengan ekonomi dengan batasan-batasan tertentu yang mana batasan tersebut ditentukan oleh negara. Dalam konsep sistem ekonomi klasik, ditentukan bahwa terdapat pendekatan yang ditetapkan dengan berdasarkan pada tiga aspek. Ketiga aspek tersebut yang pertama adalah ekonomi terhadap kebijakan politik, lalu yang kedua yaitu ekonomi terhadap institusi, dan yang ketiga ialah pendekatan publik. Dalam kaitannya dengan sistem ekonomi politik konvensional, politik memiliki dua peran yang dapat terlihat sebagai pendukung maupun penghalang terhadap perekonomian. Dimana politik dapat menjadi penghalang maupun pendukung guna melakukan sistem yang baik dalam sebuah negara dengan berbagai macam implementasi yang berkemungkinan dapat terjadi.

Kapitalisme

Pada abad ke 18, Adam Smith mengemukakan bahwa kapitalisme merupakan bagian yang termasuk ke dalam sebuah sistem ekonomi politik. Dimana Adam Smith mengemukakan bahwa kapitalisme itu sendiri adalah sebuah sistem organisasi ekonomi yang dapat ditandai dengan hak milik individu atas berbagai macam alat-alat produksi dan juga distribusi dalam berbagai bidang dengan pemanfaatannya guna mencapai suatu keuntungan maupun laba dalam kondisi kompetitif (Spencer M.H, 1990). Di sisi lain, seorang tokoh bernama Joseph Schumpeter mengemukakan pendapatnya bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem yang tidak memiliki efisiensi dan bisa mengalami pertumbuhan yang cukup cepat dalam jangka waktu yang panjang dengan memiliki level produktivitas yang tinggi. Hal ini disebabkan karena dalam kapitalisme diharuskan memiliki keuntungan atau laba yang monopoli dari sebuah kewirausahaan agar inovasi dapat terjadi. Dalam teori Schumpeter, disebutkan bahwa efisiensi dalam monopoli merupakan syarat yang penting agar dapat terjadi pertumbuhan ekonomi (Schumpeter, 1942).

Dalam sistem kapitalisme, salah satu hal yang dianggap penting adalah kepemilikan swasta. Hal ini dikarenakan teori ini berpendapat bahwa pemberian hak atas harta dan kekayaan merupakan hal yang penting dalam pemenuhan fungsi ekonomi. Pandangan tersebut diyakini dikarenakan jika seorang individu diperbolehkan mengejar kepentingannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah dengan

perbandingan dan perumpamaan yaitu *the invisible hand* maka akan mencapai hasil yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem ekonomi kapitalisme berpendapat bahwa adanya persaingan bebas dimana siapa saja yang memiliki modal dengan kekuatan yang besar maka secara otomatis dia akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meraih keuntungan dalam persaingan ekonomi, dan inilah yang disebut dengan kapitalisme tersebut. Kapitalisme sendiri sudah ada sejak abad ke 18 pada masa saat diberlakukannya revolusi industri dan masih banyak berkembang hingga periode saat ini dengan berbagai macam pembaharuan dalam konsep maupun pelaksanaannya.

Sosialisme dan Komunisme

Pandangan sosialisme dan komunisme menyebutkan bahwa ekonomi dan juga politik memiliki sebuah hubungan, yaitu ketika ideologi memiliki pengaruh terhadap system pasar yang terjadi dalam sebuah negara tertentu. Sistem sosialisme dan komunisme ini merupakan perlawanan dari sistem ekonomi politik kapitalisme. Dimana jika pada sistem ekonomi politik kapitalisme kesejahteraan bisa tidak merata karena pemerintah tidak memiliki peran yang besar, namun pada sistem ekonomi politik sosialisme dan komunisme pemerintah memiliki andil dan peran yang besar terhadap pengaturan roda ekonomi dalam sebuah negara. Pengaturan tersebut termasuk ke dalam kegiatan pengawasan sampai dengan perencanaan. Pandangan sosialisme ini melibatkan semua alat-alat produksi negara yang termasuk dalam beberapa aspek seperti di dalamnya termasuk modal seperti tanah-tanah yang dimiliki dan di dominasi oleh negara dengan melakukan penghilangan terhadap sector individu maupun swasta (Deliarnov, 2015).

Tokoh yang mengemukakan tentang sosialisme dan komunisme salah satunya adalah Karl Marx. Dimana dia merupakan seorang tokoh radikal yang memiliki prinsip bahwa setiap hak individu haruslah dihapus, hal ini didasari melihat fenomena sejarah bisa terjadi perubahan dengan disebabkan oleh faktor-faktor produksi dan penguasaan sarana produksi oleh pemilik modal atau yang biasanya disebut dengan kaum kapitalis yang melakukan pemerasan terhadap kaum proletary yang ada. Pandangan dari sistem ekonomi politik sosialisme ini memiliki beberapa prinsip, diantaranya yaitu kepemilikan harta oleh negara, kesamaan ekonomi dan juga disiplin politik. Kepemilikan harta oleh negara disini yaitu dimana pada sistem ini dibangun dengan dasar alat-alat produksi semuanya adalah milik bersama dan seorang individu tidak memiliki haknya dan wewenang atas kekuasaan tersebut. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sistem ekonomi politik kapitalisme dimana sistem ekonomi tersebut memberikan hak kepada perorangan

dengan memiliki sumber produksi (Rozalinda, 2014). Dan yang kedua adalah kesamaan ekonomi, yang pada intinya bahwa hak-hak individu suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Yang terakhir adalah disiplin politik, yang berarti bahwa untuk mencapai suatu tujuan dari sistem ekonomi sosialisme ini diperlukan aturan yang kuat untuk melakukan pengaturan agar praktek ekonomi tersebut dapat berjalan secara efisien dan juga secara efektif.

Ekonomi Politik Pembangunan

Pandangan ini memiliki dasar bahwa dalam implementasinya diperlukan pelarasan pada pembangunan yang terdapat dalam sebuah negara dengan kepentingan yang ada agar sebuah sistem yang baik dalam negara tersebut dapat tercapai secara jelas dan juga baik. Sistem ekonomi politik pembangunan ini biasanya terdapat dalam negara dunia ketiga atau tepatnya negara berkembang yang melakukan kerjasama dengan negara maju untuk melakukan kerjasama pembangunan infrastruktur yang memadai dengan tujuan agar negara berkembang tersebut memiliki modal dan dasar yang kuat untuk melakukan persaingan dengan negara lain dalam perekonomian secara global. Dalam pandangan sistem ekonomi ini, memiliki beberapa dasar yang diperlukan untuk menunjang kemampuan dalam persaingannya. Salah satu hal mendasar yang diperlukan adalah ideologi yang dipakai oleh negara tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut, sistem ekonomi politik pembangunan ini dapat melibatkan beberapa ilmu ekonomi dan politik yang memiliki tujuan untuk membangun sebuah sistem yang terbaik bagi kepentingan negaranya.

Ekonomi Politik Campuran

Kesenjangan ekonomi dan peristiwa ekonomi politik yang terjadi merupakan awal mula dari munculnya sistem ekonomi campuran ini. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa sistem ekonomi politik campuran ini merupakan sebuah sistem yang memiliki keseimbangan pemerintah dan masyarakatnya dimana pada proses implementasinya negara memberikan kebebasan pada masyarakat untuk berusaha dalam kegiatan ekonomi masing-masingnya dan di sisi lain campur tangan pemerintahan bertujuan agar ekonomi yang berjalan dalam negara tersebut dapat dihindarkan dari penguasaan golongan maupun individu dari suatu praktek ekonomi pada sistem kapitalis yang mengatur sumber daya alam serta peran negara disini adalah untuk melakukan pengaturan laju ekonomi secara merata dalam sebuah negara.

Sistem ekonomi politik ini membuat setiap individu dapat memiliki sendiri faktor produksi dari berbagai aspek dengan adanya pengawasan dari pemerintah dengan tujuan kegiatan ekonomi di masyarakat dapat berjalan dengan baik tanpa adanya yang merasa dirugikan. Selain itu, pengawasan dari pemerintah ini dimaksudkan agar adanya jaminan social kepada masyarakat serta adanya pemerataan pendapatan agar sesuai dengan struktur yang berjalan. Dalam sistem ekonomi politik ini, harga pasar bergerak dengan sendirinya tanpa adanya pengaturan dari pemerintah, tetapi terdapat suatu waktu pemerintah turut serta untuk mengaur harga pasar dengan maksud agar keseimbangan tetap terjaga di kalangan pasar. Pemerintah turun tangan dalam melakukan pengaturan terhadap harga dalam suatu pasar. Karena melihat bahwa sistem ekonomi politik campuran ini cukup efektif, beberapa negara banyak yang menggunakan sistem ini sebagai alternative yang mereka gunakan dalam pengaturan terhadap perekonomian negara mereka.

Negara yang menggunakan sistem ekonomi politik campuran ini biasanya mayoritas adalah negara dunia ketiga atau negara berkembang. Karena negara berkembang masih melakukan proses menuju ke arah pembangunan ekonomi yang lebih maju. Dan dalam kaitannya dengan hal tersebut, sistem ekonomi politik campuran ini dinilai menjadi salah satu sistem ekonomi yang paling tepat. Hal ini sesuai dengan prinsip dasarnya yaitu memberikan kebebasan terhadap masyarakat untuk mengatur harga pasar namun pemerintah tetap melakukan pengawasan dan ketika harga pasar sudah dianggap tidak sesuai maka pemerintah akan turun tangan untuk mengatur harga pasar tersebut. Salah satu contoh negara berkembang yang menggunakan sistem ekonomi politik campuran tersebut adalah Indonesia. Karena dalam pelaksanaannya perekonomian Indonesia masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah, akan tetapi masyarakat Indonesia juga tidak bisa selalu diarahkan oleh pemerintah. Masyarakat Indonesia sudah dianggap mampu untuk menentukan sendiri arah perekonomiannya tanpa selalu diawasi dan diatur oleh pemerintahnya.

Pembahasan

Sistem Ekonomi Politik Konvensional Masa Orde Baru

Dalam pendahuluan dan juga landasan teori di atas sudah dijelaskan bahwa tulisan ini akan membahas mengenai sudut pandang sistem ekonomi politik konvensional yang berkaitan dengan masa pemerintahan Orde baru di Indonesia. Hal ini menarik untuk dibahas karena Indonesia merupakan negara dengan latar belakang sejarah yang panjang, selain itu sistem pemerintahan di Indonesia yang berulang kali mengalami perubahan juga menjadi hal yang patut dijadikan dasar dan alasan yang menyebabkan sistem ekonomi politik di Indonesia turut mengalami berulang kali perubahan pula. Karena sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas bahwasannya setiap ideologi akan mempengaruhi sistem ekonomi politik yang dipilih oleh pemerintahan yang berkuasa saat itu.

Jika kita melihat mengenai sejarah pemerintahan Orde Baru, pemerintahan tersebut merupakan pergantian dari masa pemerintahan Orde Lama yang sebelumnya telah berkuasa di Indonesia. Masa pemerintahan Orde baru ini dilaksanakan di bawah pimpinan Presiden Soeharto yang diangkat menjadi presiden Indonesia pasca terjadinya peristiwa G 30 S PKI. Dilihat secara umum bahwa sebenarnya pemerintahan pada masa ini memiliki banyak hal yang membuat perekonomian cukup maju, seperti salah satunya adalah dalam hal perekonomian. Meskipun demikian, di sisi lain bahwa masa pemerintahan ini memiliki pengaruh yang kurang baik kepada masyarakat Indonesia dikarenakan pada masa ini pemerintah yang berkuasa dianggap otoriter. Hal ini terbukti dan terlihat dari banyaknya intervensi pemerintah yang masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia, contohnya adalah dalam bidang ekonomi, politik, dan juga bidang sosial.

Pada masa pemerintahan Orde baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto, jika dikaitkan dengan sistem ekonomi politik konvensional maka dapat dikaitkan dengan konsep ekonomi politik campuran dan juga ekonomi politik pembangunan. Hal ini diterapkan pada masa Orde Baru, demokrasi merupakan hal yang bisa dianggap semu karena kebebasan masyarakat sangat dibatasi dan lebih banyak mendapat kontrol dari pemerintah yang berkuasa saat itu. Jika dikaitkan dengan kegiatan perekonomian, masyarakat pada masa Orde Baru menjalankan perekonomian dengan banyak mendapatkan pengaturan dari pemerintah yang berkuasa, akan tetapi masyarakat tetap diperbolehkan melakukan kegiatan dan aktivitas ekonominya. Oleh karena itu, konsep ini sesuai dengan konsep ekonomi politik campuran dimana masyarakat tetap bisa

melakukan kegiatan perekonomian tetapi juga tetap mendapat arahan dan pengaturan dari pemerintah dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya tersebut.

Fokus awal pemerintahan Orde baru dalam bidang perekonomian sebenarnya adalah untuk melakukan pengejaran terhadap keteringgalan dengan negara-negara pertama, hal ini dikarenakan melihat adanya kebangkitan dari keterpurukan negara-negara eropa dari perang dunia kedua dengan mengandalkan bantuan yaitu *marshall plan*. Yaitu dimana sebuah sitem politik pada masa Orde baru yang menolak adanya kritik dan menolak masuknya militer, fusi atau peleburan partai seperti demokrasi yang tidak jelas atau semu tersebut menggambarkan bahwa perekonomian Indonesia pada masa tersebut tidak bisa bebas. Hal ini disebabkan karena adanya pemerintahan yang kuat dan keras sehingga masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam melakukan aktivitasnya, baik dalam kegiatan yang berhubungan dengan politik maupun kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian.

Akan tetapi, sebuah hal baru muncul ketika Soemitro Djojohadikusumo dan Widjojo Nitisastro menduduki jabatan dalam pemerintahan dan kemudian mengatur perekonomian di Indonesia pada masa Orde Baru. Dimana latar belakang Pendidikan mereka yang berasal dari barat membuat mereka memiliki ide untuk melakukan sebuah ide sentral yaitu membuka adanya kegiatan industrialisasi yang besar dan melakukan *tricklr down effect* yang menyebabkan munculnya pusat ekonomi dan kemudian membuat efek rambatan. Pusat dari industrialisasi tersebut adalah Jakarta dan efek rambatan yang dimaksud adalah ketika perekonomian Jakarta berkembang, maka hal ini akan membuat efek rambatan berupa wilayah-wilayah lain di sekitar Jakarta perekonomiannya dapat berkembang pula. Namun, hal tersebut memiliki sebuah kelemahan, yaitu pembangunan atau perkembangana perekonomian akan menjadi tidak merata dan terdapatnya sentralisasi pembangunan yang dapat menyebabkan kecemburuan sosial bagi masyarakat lain yang tinggal di wilayah yang cukup jauh jaraknya dari Jakarta sebagai pusat industrialisasi tersebut.

Pada masa Orde Baru, pemerintahan yang brkuasa pada saat itu juga memiliki beberapa kebijakan untuk melakukan pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah tujuan untuk melakukan pemulihan ekonomi pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1973. Kebijakan yang diambil saat itu contohnya yaitu seperti Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan juga Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kebijakan tersebut diambil dengan maksud dan tujuan agar perekonomian di kota-kota besar Indonesia lainnya dapat ikut berkembang pula tidak hanya di Jakarta saja dan

membuat semakin menguatnya pandangan masyarakat mengenai sentralisasi pemerintah yang berkuasa saat itu. Meskipun bertujuan untuk mengembangkan perekonomian Indonesia, akan tetapi kebijakn tersebut juga mendapat aksi protes dari kalangan mahasiswa dan para intelektual lainnya. Hal ini dikatenakan mereka berpendpat bahwa dengan adanya kebijakn tersebut, membuat masyarakat khawatir para investor asing akan semakin mudah masuk ke Indonesia. Hal ini membawa kekhawatiran karena dengan maraknya investor asing yang masuk ke Indonesia akan menyebabkan sistem perekonomian di Indonesia tercemar paham kapitalisme yang membuat kehancuran bidang perekonomian. Aksi protes tersebut disebut dengan peristiwa MALARI atau Malapetaka Lima belas Januari.

Kemudian pada masa periode liberalisasi ekonomi pada tahun 1982-1997, pada masa ini harga minyak stabil tetapi membuat negara jatuh defisit dimana adanya hubungan antara Presiden soeharto dengan pihak luar dan investor asing menyebabkan banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh preisden merupakan campur tangan dari investor asing. Kebijakan tersebut seperti contohnya adalah murahnya harga upah buruh yang menyebbkan kapitalisme pada masa ini sangat terlihat dengan jelas. Selain itu, pada akhirnya ketika pemerintahan Orde baru ini runtuh, pemerintahan Presiden Soeharto meninggalkan hutang luar negeri yang tidak terbandung dan efek paling parahnya adalah dengan terjadinya krisis moneter di Indonesia pada yahun 1997 yang juga menyebabkan kerusuhan besar-besaran dimana mana dan juga menimbulkan korban jiwa maupun materi yang tidak ternilai hartanya. Selin itu, kerusuhan ini juga menyebabkan adanya perselisihan yang menyangkut isu SARA di Indonesia dengan masyarakat asli Indonesia dengan masyarakat keturunan etnis Tionghoa yang bertempat tinggl di Indonesia.

Karena hal tersebut, pada akhirnya masyarakat Indonesia melakukan demonstrasi untuk menurunkan rezim Orde baru yang sudah dianggap tidak bisa lagi memimpin dan mengarahkan Indonesia kea rah yang lebih maju lagi. Pada akhirnya, masyarakat Indonesia berhasil menurunkan rezim Orde Baru yang berkuasa saat itu setelah presiden Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun.

Sistem Ekonomi Politik Konvensional Masa Reformasi

Jika kita membahas mengenai sistem ekonomi politik pada masa orde baru, sistem ekonomi politik yang konsepnya digunakan adalah sistem ekonomi politik campuran. Kemudian jika kita akan membahas mengenai sistem ekonomi politik dalam masa reformasi, maka konsep yang dapat digunakan adalah konsep ekonomi politik pembangunan. Hal ini dikarenakan pada masa reformasi, salah satu contohnya yaitu pada masa sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kebijakan yang diambil pemerintah terfokus pada pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia.

Salah satu kebijakan saat ini yang menjadi perhatian adalah tentang RUU Omnibus Law. Pada kebijakan ini, pemerintah memberikan kemudahan pada investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan membuat pusat industrialisasi di Indonesia. Hal ini dapat dikaitkan dengan sistem ekonomi politik konvensional terutama konsep ekonomi politik pembangunan. Pada konsep ini, negara dunia ketiga atau negara berkembang seperti contohnya Indonesia biasanya akan melakukan kerjasama dengan negara maju dalam pemajuan kegiatan perekonomian guna menunjang kemajuan pembangunan kegiatan ekonominya.

Tujuan dari RUU Omnibus Law itu sendiri adalah ketika banyak investor asing yang membuat kegiatan produksi maupun industrialisasi di Indonesia, maka infrastruktur perekonomian di Indonesia juga dapat berkembang seperti akan bermunculan lapangan pekerjaan yang semakin banyak dan pajak dari kegiatan industrialisasi investor asing tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur penunjang perekonomian seperti jalan raya maupun jalan tol.

Meskipun tujuan dari RUU Omnibus Law ini menurut pemerintah merupakan hal yang baik, akan tetapi banyak masyarakat yang berpandangan bahwa banyak terdapat pula hal negatif yang dapat terjadi ketika investor asing masuk ke dalam Indonesia dan melakukan kegiatan industrialisasinya. Hal negatif tersebut antara lain adalah akan semakin rusaknya alam dan lingkungan sekitar wilayah yang dijadikan pusat industrialisasi, kemudian akan terjadi konflik juga dengan masyarakat sekitar jika masyarakat sekitar tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dari adanya kegiatan industrialisasi tersebut.

Dampak yang lebih ditakutkan lagi ialah, dengan adanya investor asing maka akan banyak pihak asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Dan ketika hal ini terjadi, maka

sudah dipastikan bahwa pemerintah akan bersinggungan dengan pihak luar juga yang ditakutkan akan membawa pengaruh terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Hal ini tentu sangat dihindari akibat dari trauma masyarakat Indonesia ketika pada masa Orde baru ketika di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto banyak terjadi kapitalisme akibat dari presiden Soeharto yang memiliki kedekatan dengan para investor asing. Yang mana pada akhirnya kebijakan perekonomian yang dilakukan oleh presiden Soeharto saat itu merupakan hasil arahan dari pihak investor yang hanya ingin meraih keuntungan sebesar besarnya dari keberadaannya di Indonesia.

Konsep ekonomi politik pembangunan ini juga memiliki dampak negative yaitu ketika pembangunan dilaksanakan dengan mengandalkan hutang dari pihak luar negeri seperti International Monetary Fund, maka pada akhirnya organisasi tersebut akan mengarahkan negara peminjamnya ke arah ideologi yang diinginkan dan pada akhirnya yang terjadi adalah kehancuran perekonomian dari negara peminjam tersebut.

Kesimpulan

Setiap masa pemerintahan di Indonesia akan memiliki ciri khasnya masing-masing dalam pemilihan ideologi maupun sistem ekonomi politik yang digunakannya. Hal ini bergantung pada bagaimana keadaan perekonomian masyarakatnya saat itu dan juga bagaimana pemikiran pemimpin negara serta para pejabat negara yang berkuasa saat itu. Meskipun setiap masa pemerintahan akan memilih sistem ekonomi politiknya masing-masing, akan tetapi tujuan utama dari sistem ekonomi politik yang digunakan oleh pemerintahan yang berkuasa adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat dan bangsanya.

Karena pada dasarnya, tidak ada negara manapun yang bertujuan mengarahkan perekonomian bangsa dan negaranya serta masyarakatnya menuju ke arah kehancuran. Sehingga sudah pasti bagaimanapun dan apapun caranya akan negara dan pemerintahan lakukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya adalah kesejahteraan di bidang perekonomian.

Daftar Pustaka

Deliarnov. (2015). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo.

James A Caporaso, D. L. (1992). *Teori-teori EKonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Schumpeter, J. (1942). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Harper and Brother.